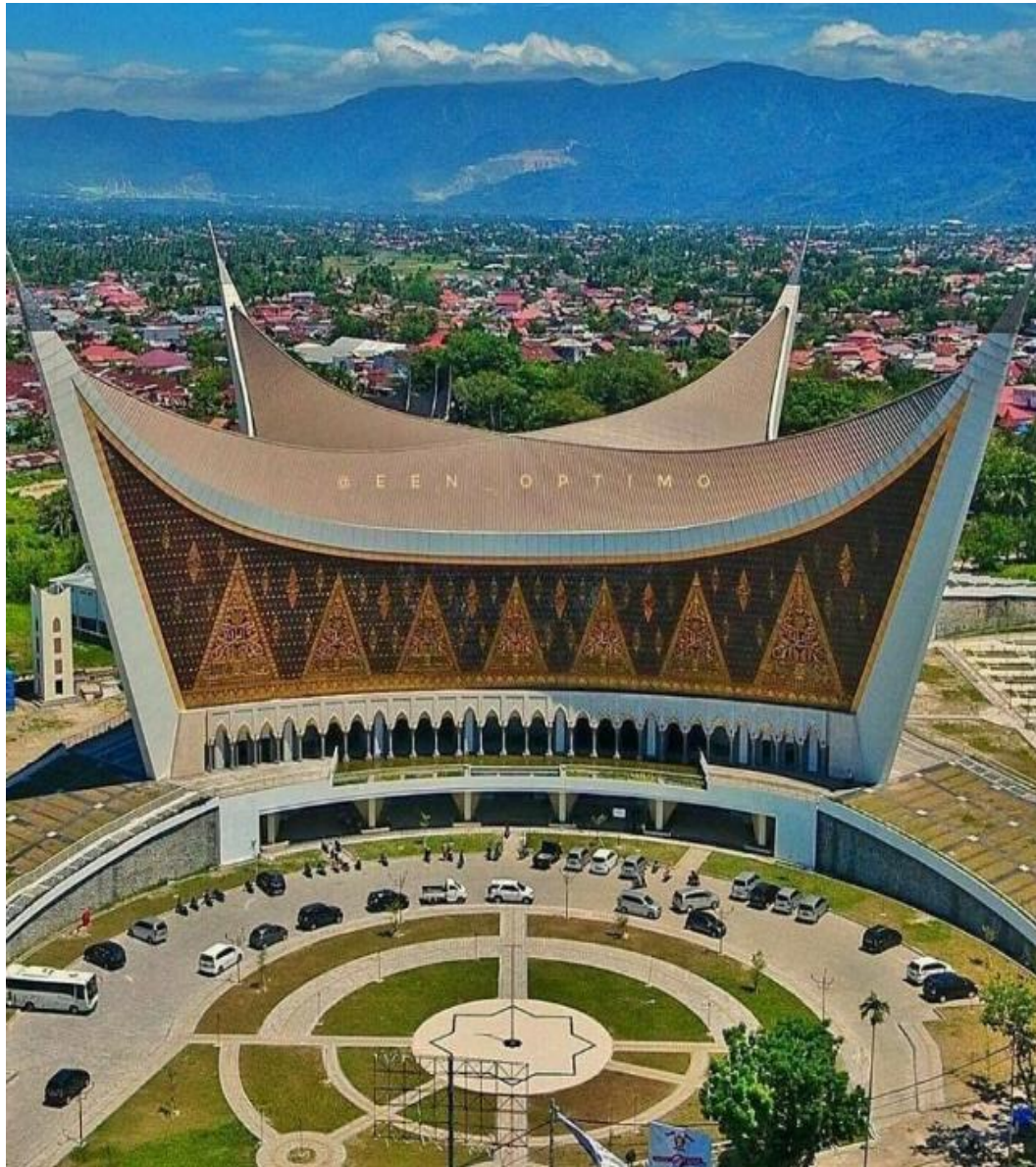


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada masyarakat, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Diharapkan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat mencerminkan semua yang telah dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat serta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



Ir. Edi Dharma, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680513 199403 1 014

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Organisasi	3
1.2 Aspek Strategis Organisasi	12
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	22
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.4 Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	60

BAB I

Pendahuluan

1.1 Gambaran Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar;
- b) Penyelenggaraan pengoordinasi dan fasilitasi bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar;
- c) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar;

Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tiga Bagian yaitu Bagian Bina Mental Spiritual, Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar dengan masing-masing memiliki Sub-Sub Bagiannya yang hampir semuanya beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) tetapi masih

ada satu Sub Bagian yang tetap pada jabatan structural yaitu Sub Bagian Tata Usaha. Bagian dan Sub Bagian ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar. Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan;
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan;
- c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
- c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Bina Mental Spritual memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha;
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan TataUsaha;
- c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha;dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- b) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c) Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d) Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKjPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro;
- g) Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h) Melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i) Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j) Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi tiga Bagian dan delapan Sub-Bagian yang sudah disetarakan dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan satu Sub Bagian yang masi struktural sebagai berikut:

1. Bagian Kesra Pelayanan Dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Sub Substansi Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial.
2. Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Sub Substansi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.
3. Bagian Bina Mental Spiritual yang dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang membawahi 2 Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual. Serta membawahi 1 Jabatan Struktural yaitu Kasubag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat.

C. Struktur Organisasi

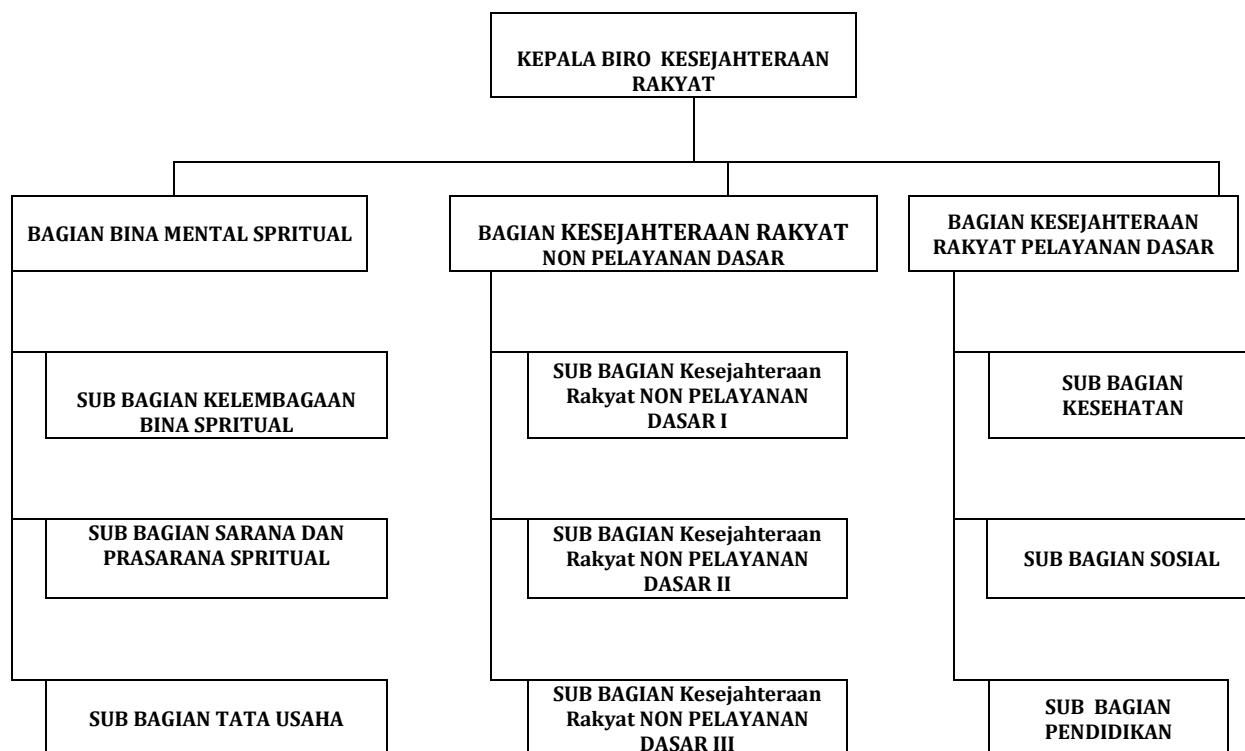
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Barat, Struktur Organisasi, Biro Kesejahteraan Rakyat dibentuk dengan struktur :

1. Kepala Biro,
2. Bagian Bina Mental Spritual terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spritual
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Sarana prasarana Spritual
 - c) Sub Bagian Tata Usaha
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kesehatan
 - b) Sub Bagian Sosial
 - c) Sub Bagian Pendidikan

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Biro hingga Kepala Sub Bagian pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan. Struktur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat

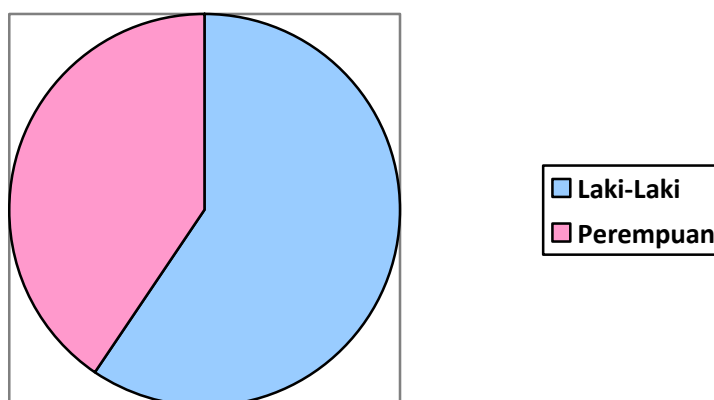


D. Sumber Daya Biro Kesejahteraan Rakyat

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat berjumlah 30 (Tiga Puluh) orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan di uraikan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 17 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Dari data tersebut dapat dikatakan antara jumlah pegawai laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan, hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Komposisi Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	-	0%
2	SLTA	7	23,33%
3	DIPLOMA III/D-3	1	3,33%
4	STRATA 1	11	36,67%
5	STRATA 2	11	36,67%
6	STRATA 3	-	0%
	JUMLAH	30	100%

Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Kesejahteraan Rakyat karena lebih dari 73,34% pegawai sudah berpendidikan sarjana, sedangkan sebanyak 26,33% adalah tamatan D3 dan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural.

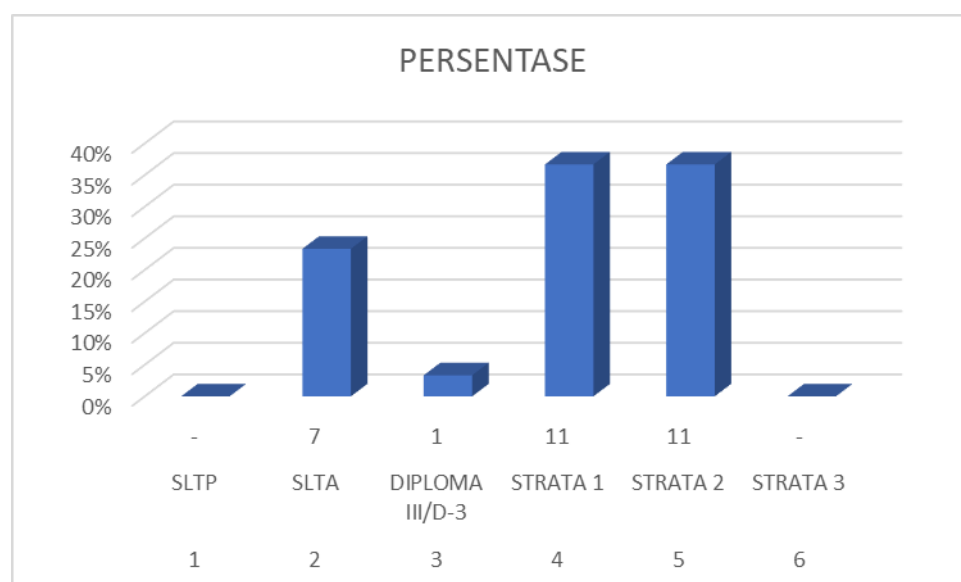
Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah :



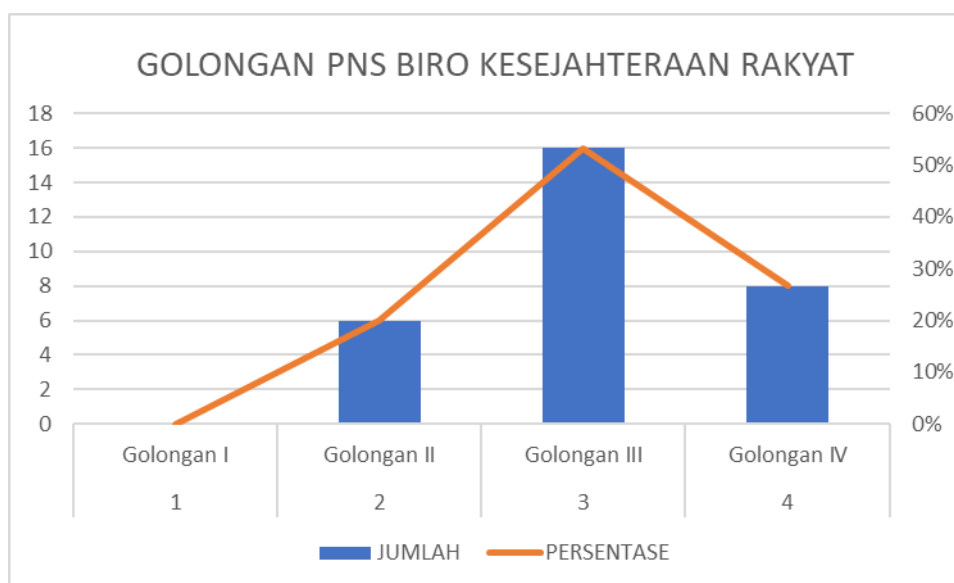
Tabel. 1.2
Daftar Golongan Pegawai
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	20%
3	Golongan III	16	53,33%
4	Golongan IV	8	26,67%
	J u m l a h	30	100%

Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, 53,33% dari total pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III. Golongan II sebanyak 20% dari jumlah pegawai dan golongan IV sebesar 26,67% yang terdiri dari 5 pejabat struktural, diukur dari komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per golongan

Gambar 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

1.2 Aspek strategis organisasi

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam penyiapan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian kerja tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesra pelayanan dasar dan kesra non pelayanan dasar, sebagai berikut :

- Koordinasi dengan SKPD terkait perumusan bahan kebijakan umum bidang Bina Mental Spiritual, Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar.

- Koordinasi dengan SKPD terkait fasilitasi kebijakan bidang Bina Mental Spiritual, Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar.
- Koordinasi dengan SKPD terkait Pelaporan dan Evaluasi bidang Bina Mental Spiritual, Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar.
- Pelaksanaan hibah rumah ibadah, lembaga, TK dan Paud Lingkup Provinsi Sumatera Barat
- Memfasilitasi Embarkasi dan Debarkasi Haji Lingkup Sumatera Barat dan Bengkulu.
- Memfasilitasi pelaksanaan lomba STQ/MTQ Nasional Setiap Tahunnya.
- Memfasilitasi pelaksanaan peringatan hari besar agama islam .

1.3 Permasalahan utama (*strategic issued*)

1. Adanya penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional maka Biro Organisasi melakukan penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional pada bulan Desember 2021 dimana jabatan yang dulunya struktural beralih ke dalam jabatan fungsional tertentu dengan aturan jabatan fungsional yang mengikuti ketentuan dari kementerian teknis terkait. Dengan adanya penyetaraan ini menyebabkan beberapa eselon IV mengalami keterlambatan dalam hal administrasi kepegawaian yang perlu di koordinasikan lebih lanjut ke tingkat pusat dan juga perubahan tugas dan fungsi yang diemban oleh jabatan fungsional tertentu juga menjadi tumpang tindih dengan tugas struktural.
2. Rencana implementasi penyederhanaan birokrasi. Rencana penyederhanaan birokrasi membuat beberapa OPD merasa penyederhanaan ini menghilangkan tugas dan fungsi dari OPD tersebut yang berdampak kepada penganggaran kegiatan pada OPD tersebut sedangkan dari sudut pandang lain penyederhanaan ini merupakan salah satu cara untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan juga menghindari double tugas dan fungsi dari OPD.

3. Masih kurangnya jumlah ASN yang professional untuk mengelola semua kegiatan di Biro Kesejahteraan Rakyat.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mengelola kegiatan di Biro Kesejahteraan Rakyat.
5. Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Penetapan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dimuat dalam lampiran LKJIIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Rencana Kinerja yang akan dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2025 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026. Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun mengacu kepada tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat telah mengacu pada sistematika penyusunan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) merupakan salah satu OPD dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan yang menyangkut sosial kemasyarakatan.

Dengan kondisi tersebut, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misinya. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahunnya.

Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;

2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2021-2026;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana program pembangunan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
5. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2021-2026.

2.2 Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat awal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI	FORMULA/PENJELASAN		SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas kegiatan mental spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	Perbandingan Jumlah lembaga Bina Spritual yang aktif dengan target tahun N	$\Sigma =$	Realisasi Target : Target	Bagian Bina Mental Spiritual
		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	Indeks kepuasan stake holder terhadap layanan embarkasi haji adalah indeks kepuasan jama'ah haji yang melakukan haji pada tahun N. Ket : 25 - 64,99 = tidak baik 65 - 76,60 = kurang baik 76,61 - 88,30 = baik 88,31 - 100 =	$\Sigma =$	Realisasi Target : Target	

			<p>sangat baik</p> <p>dengan rumusan berpedoman pada Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>			
		Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	Peringkat yang didapat oleh Provinsi Sumatera Barat dalam event Nasional pada tahun N	$\Sigma =$	<p>Peringkat (MTQ/STQ/MQK) Nasional di peroleh dari yang di peroleh Sumatera Barat dalam ajang MTQ Nasional pada tahun N</p> <p>Target</p>	
2	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil rumusan yang dihasilkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar pada tahun N	$\Sigma =$	Realisasi Target : Target	Bagian Kesra PD dan Kesra NPD
3	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan pada tahun N	$\Sigma =$	Realisasi Target : Target	Bagian Kesra PD dan Kesra NPD
4	Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti pada Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	$\Sigma =$	Realisasi Target : Target	Bagian Kesra PD dan Kesra NPD
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun N	$\Sigma =$	Realisasi Target : Target	Bagian Bina Mental Spiritual

6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Nilai terhadap pelayanan internal organisasi	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	$\Sigma =$	Realisasi Target : Target	Bagian Bina Mental Spiritual
---	--	---	---	------------	---------------------------	------------------------------

2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2025. sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penetapan Kinerja Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perjanjian Kinerja Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	8 Lembaga
		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	A (90)
		Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	Peringkat 10 Nasional
2	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	6
3	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	6

4	Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	6
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (71)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (87)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 4.980.467.372,-	APBD
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 16.562.003.628,-	APBD
	Jumlah	Rp21.542.471.000,-	

Target Indikator Kinerja Pada perjanjian kinerja tahun 2025 memiliki perbedaan dengan target Indikator Kinerja pada renstra Biro Kesra tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut :

- Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji yang pada target renstra BB (88) adanya kenaikan target PK menjadi A (90) dikarenakan pada tahun 2024 kami sudah mencapai target dan terealisasi A (90).
- Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK) pada renstra mempunyai target Peringkat 8, tetapi di Perjanjian Kinerja memiliki target Peringkat 10 Biro Kesra menurunkan target dikarenakan pada tahun 2024 mendapatkan peringkat 11.

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada renstra mempunyai target BB (70,01) tetapi di Perjanjian Kinerja memiliki target BB (71), Biro Kesra menaikan target dikarenakan pada tahun 2024 mendapatkan nilai BB (71,44).
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi pada renstra mempunyai target BB (83) tetapi di Perjanjian Kinerja memiliki target B (87), Biro Kesra menaikan target dikarenakan pada tahun 2024 mendapatkan kenaikan nilai B (86).

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Metodologi Pengukuran capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

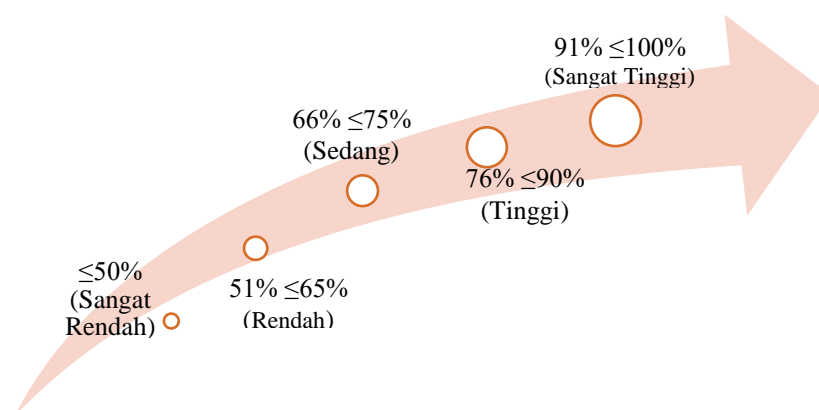
- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi})/\text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja yang memuaskan. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 55% termasuk pada angka capaian kinerja yang kurang baik. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	1	2	3	4	5	6

I	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Mental Spiritual	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI,B WI, KDEK, Koperasi Syariah Mesjid Raya Sumbar)	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI,B WI, KDEK, Koperasi Syariah Mesjid Raya Sumbar)	100%
			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	A (90)	A (90)	100%
			Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/ MQK)	peringkat 10 Nasional	peringkat 12 Nasional	80%

II	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar		Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	6	6	100%
	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar		Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	6	6	100%
	Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar		Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	6	6	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	BB (71,44)	100,61%

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B(87)	B(83)	95.40%
Rata-Rata Capaian						97%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 6 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 6 sasaran strategis tahun 2025 adalah 97%. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 97% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori **Sangat Tinggi**.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 dengan realisasinya selama tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

Adapun analisa dari pencapaian ketiga sasaran strategis dari Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada tabel 3.2 diatas akan diuraikan sebagai berikut:

Pembahasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran

✚ **Sasaran 1** : Meningkatkan Kualitas Kegiatan Mental Spiritual:

- 1) Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif dengan capaian kinerja 100%.
- 2) Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji (Target Kinerja: A (90), (Realisasi Kinerja: A (90)) dengan capaian Kinerja 100%.

- 3) Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK) (Target Kinerja: peringkat 10 Nasional) (Realisasi Kinerja: peringkat 12 Nasional) dengan Capaian Kinerja 80%

Sasaran Meningkatnya Fasilitas Pembangunan dan Pengembangan Bina Spiritual Masyarakat diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja sebagaimana tersaji berikut ini

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
1	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Masjid Raya Sumbar)	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Masjid Raya Sumbar)	100%
2	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	A(90)	A(90)	100%
3	Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	peringkat 10 Nasional	peringkat 12 Nasional	80%

Indikator 1 : Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif

Dari tabel diatas dapat dilihat, jumlah lembaga bina spiritual yang aktif adalah sebanyak 8 lembaga hal tersebut dapat dilihat dari Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku hingga saat ini (bukti dukung) dan 8 lembaga tersebut (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Masjid Raya Sumbar) di fasilitasi oleh Biro Kesra berkantor di Masjid Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.

Dengan Metode Perhitungan :

Realisasi / Target x 100 %

= 8 / 8 x 100 % = 100%

Indikator 2 : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji

Dari tabel diatas untuk target A (90) maka ini menandakan bahwa pelayanan layanan Pemda Embarkasi Haji telah memenuhi bahkan melampaui target pemda dengan hasil A (90), capaian tersebut mencerminkan tingkat kepuasan jemaah yang sangat baik terhadap kualitas layanan yang diberikan, keberhasilan ini menunjukkan efektivitas koordinasi, profesionalitas, petugas serta optimalnya fasilitas dan sistem pelayanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mengacu pada pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diperoleh nilai rata-rata keseluruhan unsur pelayanan sebesar 3,61. sesuai ketentuan perhitungan IKM, sehingga menghasilkan nilai indeks sebesar 90,00. Berdasarkan interval penilaian IKM, nilai tersebut termasuk dalam kategori A dengan mutu pelayanan "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa sangat puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan platform Google Forms yang dibagikan melalui tautan (link) kepada responden. Dari proses pengumpulan data tersebut, diperoleh sebanyak 679 responden dengan 5 pertanyaan yang mewakili indikator pelayanan dan menggunakan skala penilaian 1-4. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai rata-rata (NRR) sebesar 3,61. sehingga menghasilkan nilai indeks sebesar 90,00. Berdasarkan kategori penilaian IKM, nilai tersebut berada pada interval 88,31-100 yang termasuk dalam kategori A dengan mutu pelayanan "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa sangat puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Tingginya nilai indeks serta jumlah responden yang mencapai 679 orang memperkuat bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi bahkan melampaui harapan masyarakat, meskipun evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan kualitas tersebut.

Indikator 3 : Peringkat dalam event Keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)

Dari tabel diatas dapat dilihat prestasi provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dalam perlombaan STQH Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan peringkat 12. Prestasi tersebut tidak memenuhi target Biro Kesejahteraan Rakyat untuk mencapai peringkat 10 besar. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti :

1. Training Center yang kurang maksimal seperti kurangnya mendatangkan pelatih nasional
2. Kesehatan peserta kurang fit pada saat perlombaan seperti (Demam, flu, diare)
3. Standar penilaian yang meningkat atau jumlah pesaing yang kuat.

Dengan metode perhitungan sebagai berikut :

$$(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

$$= (2 \times 10) - 12 / 10 \times 100\%$$

$$= 20 - 12 / 10 \times 100\% = 80\%$$

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 3 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

NO	INTERVAL NILAI	KINERJA PELAYANAN
1.	25,00 - 64,99	Tidak Baik
2.	65,00 - 76,60	Kurang Baik
3.	76,61 - 88,30	Baik
4.	88,31 - 100	Sangat Baik

STQ dan MTQ merupakan satu kesatuan kegiatan musabaqah, meskipun berbeda dari segi waktu maupun tujuan pelaksanaan. STQ digelar dua tahun sekali pada tahun-tahun ganjil, sedangkan Msabaqah Tilawatil Quran (MTQ) digelar dua tahun sekali pada tahun-tahun genap. STQ dilaksanakan untuk memilih juara-juara yang akan bertanding pada ajang MTQ, yang nantinya akan mewakili Indonesia pada MTQ Internasional.

Pada pelaksanaan STQ Nasional XXVIII di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, dimeriahkan oleh aksi tarian di arena utama pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang, setiap cabang yang diperlombakan.

Berikut 10 besar juara umum STQ Nasional XXVIII di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 :

1. Kafilah Kalimantan Timur
2. Kafilah Daerah Khusus Jakarta
3. Kafilah Sumatera Selatan
4. Kafilah Jawa Timur
5. Kafilah Riau
6. Kafilah Jawa Barat
7. Kafilah Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan
8. Kafilah Kepulauan Riau
9. Kafilah Sulawesi Tenggara
10. Kafilah Nusa Tenggara Barat

Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan dari penilaian IKM yang telah dilakukan termasuk kedalam kategori Sangat Baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi

a. a. Sumber Data

Data bersumber dari Sub Bagian Kelembagaan Bina Mental Spiritual, Jumlah lembaga Spiritual yang aktif di bawah pengawasan Biro Kesejahteraan Rakyat, Indeks Kepuasan terhadap layanan embarkasi haji

pada tahun 2025 dan data Peringkat Sumatera Barat dalam event keagamaan STQ Nasional XXVIII di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

b. b. Metodologi Perhitungan

Jumlah Lembaga Spiritual yang aktif bisa dilihat dari data yang diberikan oleh Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual. Sedangkan untuk penentuan Indeks Kepuasan Layanan embarkasi Haji, Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual menyebarkan kuisioner kepada jama'ah Haji pada Tahun 2025. Untuk Peringkat Sumatera Barat dalam event keagamaan STQ Nasional XXVIII di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 bisa dilihat dari Media Nasional, hasil yang didapatkan Sumatera Barat dalam event keagamaan STQ Nasional XXVIII di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 adalah peringkat 12 Nasional.

2. Analisis Capaian Kinerja

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025.

Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif pada tahun 2024 adalah 8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Masjid Raya Sumbar) sama dengan Tahun 2025 ini yang difasilitasi sebanyak 8 Lembaga. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji pada tahun 2024 A(90) sedangkan pada tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024 yaitu A (90). Indikator Kinerja Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK) pada tahun 2024 Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK) adalah peringkat 11 dengan capaian 90.90% sedangkan pada Tahun 2025 mengalami penurunan yang dimana target peringkat 10 yang dicapai adalah peringkat 12 dengan capaian 80%, dimana terdapat penurunan realisasi pada tahun 2025. Target dari Indikator Kinerja ini ditetapkan bersama melalui rapat dengan OPD teknis terkait yang kemudian ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yang menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan setiap tahunnya.

Tabel 3.4 :
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis dari tahun 2021 s/d 2026

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja 2021			Kinerja 2022			Kinerja 2023			Kinerja 2024			Kinerja 2025			Kinerja 2026			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Kegiatan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	0	0	0	7	9	128,58%	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Mesjid Raya Sumbar)	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Mesjid Raya Sumbar)	100%	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Mesjid Raya Sumbar)	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Mesjid Raya Sumbar)	100%	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Mesjid Raya Sumbar)	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Mesjid Raya Sumbar)	100%	8 Lembaga (LPTQ, BAZNAS, MCI, DMI, BKPRMI, BWI, KDEK, Koperasi Syariah Mesjid Raya Sumbar)			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025

Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	B (80)	B (80)	100 %	B (81)	B (81)	100 %	B (82)	B (82)	100%	B(82)	A(90)	109 %	A(90)	A(90)	100%	BB (89)		
Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	0	0	0	Peringkat 10 Nasional	Peringkat 5 Nasional	200 %	Peringkat 8 Nasional	Peringkat 10 Nasional	80%	peringkat 10 Nasional	peringkat 11 Nasional	90.90%	peringkat 10 Nasional	peringkat 12 Nasional	80%	peringkat 8 Nasional		

lima tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target yaitu: dengan 8 Lembaga Spiritual yang aktif sampai dengan 8 Lembaga Spiritual yang aktif. Pencapaian yang telah dicapai oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk tahun kedua renstra ini yaitu peringkat 8 Lembaga Spiritual yang aktif.

Target untuk indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji pada tahun 2025 (tahun kedua) di dalam dokumen Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2021 - 2026 adalah sangat puas A (90). Maka target tahun kedua pada Renstra 2021 - 2026 untuk indikator terpenuhi atau tercapai target. Sedangkan untuk masa periode Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu untuk periode lima tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target yaitu sangat puas.

e. Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

f. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Adanya dukungan penuh dari seluruh ASN Biro Kesejahteraan Rakyat untuk menyelesaikan Kegiatan.
2. Adanya kerjasama Biro Kesra dengan Stakeholder terkait yang menyebabkan berjalan lancarnya kegiatan.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Kesejahteraan Rakyat dengan 1 kegiatan yaitu Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual pada Sub kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual.

✚ **Sasaran 2** : Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar

Indikator 2 : Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti

Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti (Target Kinerja: 6) (Realisasi Kinerja: 6) dengan capaian kinerja 100%.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
I	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	6	6	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dengan kategori Baik berdasarkan tabel 3.1.

1. Realisasi

Adapun Rumusan Kebijakan yang dihasilkan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Kesra Pelayanan Dasar

- Bidang Pendidikan : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 420/344/Kesra-2025 tanggal 24 Juli 2025 Perihal : Rumusan Rakerda Tim Pembina UKS/M TK. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan tema Pembinaan Sekolah/Madrasah Sehat melalui Program Deteksi Dini Kesehatan Jiwa.
- Bidang Kesehatan : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 460/473.b/Kesra-2025 tanggal 22 September 2025 Perihal Hasil Rumusan Rakor Kebijakan Kesra Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan tema Peningkatan Koordinasi Dalam Pencegahan dan Penanganan Kesehatan Jiwa dan Mental Pada Anak Usia Sekolah.
- Bidang Sosial : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 451-288-2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Tahun 2025.

Dengan dihasilkannya 3 rumusan kebijakan tersebut di atas, maka capaian target kinerja kebijakan kesra pelayanan dasar adalah sebagai berikut : $3/3 \times 100\% = 100\%$

B. Kesra Non Pelayanan Dasar

Jumlah hasil rumusan kebijakan pada bidang Kesra Non Pelayanan Dasar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Bidang	Rumusan Kebijakan	Tindak Lanjut
Kebudayaan	Kebijakan tentang Babudaya Minang dalam kehidupan masyarakat terutama dalam dunia kerja	Diterbitkan SE Gubernur No 04 Tahun 2025 tentang Babudaya Minang

Bidang	Rumusan Kebijakan	Tindak Lanjut
Perlindungan Anak	Kebijakan dalam mewujudkan sekolah ramah anak dalam bentuk penanganan kekerasan anak dan perilaku menyimpang	Penguatan SOP dan Pembentuk Tim dan dan Rencana Kerja dalam rangka penanganan perilaku menyimpang bagi Boording School yang sudah difasilitasi
Komunikasi dan Informatika	Kebijakan mewujudkan Internet sehat, aman dan produktif	Penguatan SK Gubernur Sumatera Barat lintas sektor untuk mewujudkan internet sehat, aman dan produktif
Perhubungan	Mewujudkan akselerasi transportasi publik berkelanjutan untuk PALAPA	Memfasilitasi dalam bentuk Rapat Koordinasi bagi kabupaten/kota untuk wilayah pembangunan PALAPA

h. a. Sumber Data

Data bersumber dari Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar, Jumlah hasil Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti pada Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar.

i. b. Metodologi Perhitungan

Penentuan persentase Jumlah hasil Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti pada Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar yang nantinya akan dibandingkan dengan Target Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

b. Pada tahun 2024 Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti memiliki target 6 rumusan kebijakan dengan realisasi 4 rumusan kebijakan dengan capaian 66,67%, sedangkan Pada tahun 2025 Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti memiliki target 6 rumusan kebijakan dengan realisasi 6 rumusan kebijakan terdapat kenaikan hasil rumusan kebijakan dan capaian 100%.

c. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 (tahun kedua) di dalam dokumen Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2021 – 2026 adalah 6 Kebijakan, terealisasi dengan nilai 6 Kebijakan.

d. Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Perencanaan yang matang berdasarkan :
 - Kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis terhadap kebutuhan masyarakat dan analisis kondisi sosial-ekonomi.
 - Melibatkan stakeholder sejak awal sehingga kebijakan relevan dan mudah diterima.

2. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan, kebijakan yang dirumuskan sudah terintegrasi dengan RPJMD, Renstra dan program Nasional dan sesuai regulasi yang ada.
3. Komitmen Pimpinan dan Instansi Pelaksana, adanya arahan dan dukungan penuh dari pimpinan daerah untuk menindaklanjuti kebijakan sesuai dengan kewenangan dan anggaran.
4. Monitoring dan Evaluasi yang konsisten, mekanisme pelaporan tindaklanjut kebijakan berjalan baik serta evaluasi berkala memastikan setiap kebijakan segera ditindaklanjuti.
5. Kalaborasi lintas sektor, kerjasama dengan OPD terkait sesuai dengan kewenangan untuk mempercepat implementasi serta partisipasi dalam bentuk komunitas untuk untuk mendapat dukungan.
6. Penguatan Kapasitas Pelaksana dalam mewujudkan implementasi lebih efektif

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Kesejahteraan Rakyat, dua kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar serta dengan enam sub kegiatan yang mendukung yaitu Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan. Keenam Sub kegiatan tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

✚ **Sasaran 3** : Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar

Indikator3 : Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan

Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan (Target Kinerja: 6) (Realisasi Kinerja: 6) dengan capaian kinerja 100%.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
I	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	6	6	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik berdasarkan tabel 3.1. Pencapaian Indeks Jumlah Lembaga Spiritual yang aktif tercapai,

yaitu dari target 6 Optimalisasi Implementasi Kebijakan dengan realisasi 6 Optimalisasi Implementasi Kebijakan di tahun 2025.

1. Realisasi

Adapun Jumlah Kebijakan yang diimplementasikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Kesra Pelayanan Dasar

Adapun 3 Kebijakan Kesra Bidang Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan : Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah / Madrasah Sehat.
2. Bidang Kesehatan : Pelaksanaan Koordinasi Guna Percepatan Tindak Lanjut Hasil Rakor Kesehatan Tahun 2025.
3. Bidang Sosial : Pembuatan Policy Brief optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor untuk Mengantisipasi Aksi Tawuran dan Bullying di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan pengimplementasian 3 kebijakan tersebut di atas, maka capaian target kinerja dengan indikator kinerja jumlah kebijakan kesra pelayanan dasar yang diimplentasikan adalah sebagai berikut : $3/3 \times 100\% = 100\%$

B. Kesra Non Pelayanan Dasar

Jumlah Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar yang di Implementasikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Bidang	Rumusan Kebijakan	Tindak Lanjut	Implementasi
Kebudayaan	Kebijakan tentang Babudaya Minang dalam kehidupan masyarakat terutama dalam dunia kerja	Diterbitkan SE Gubernur Nomor 04 Tahun tentang Babudaya Minanhg	Dilakukan Sosialisai SE Gubernur Nomor Baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota (Hasil Laporan)

Bidang	Rumusan Kebijakan	Tindak Lanjut	Implementasi
Perlindungan Anak	Kebijakan dalam mewujudkan sekolah ramah anak dalam bentuk penanganan kekerasan anak dan perilaku menyimpang	Penguatan SOP dan Pembentuk Tim dan Rencana Kerja dalam rangka penanganan perilaku menyimpang bagi Boording School yang sudah difasilitasi	Rapat Koordinasi Evaluasi pembentuk SOP dan Rencana Kerja (Rakor pada tanggal 4 Desember 2025, Berita Acara Kesepakatan)
Komunikasi dan Informatika	Kebijakan mewujudkan Internet sehat, aman dan produktif	Penguatan SK Gubernur Sumatera Barat lintas sektor untuk mewujudkan internet sehat, aman dan produktif	Sosialisasi dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan OPD Teknis, Komunikasi/Forum dan Pengurus Mesjid Raya (Rakor tanggal 22 November 2025 Berita Acara kesepakatan)
Perhubungan	Mewujudkan akselerasi transportasi publik berkelanjutan untuk PALAPA	Memfasilitasi dalam bentuk Rapat Koordinasi bagi kabupaten/kota untuk wilayah pembangunan PALAPA	Melakukan koordinasi melalui pemberitahuan hasil dari pada Rakor pada tanggal 7 Agustus 2025 tentang Akselerasi transportasi publik berkelanjutan untuk PALAPA sesuai dengan kewenangan dan anggaran tersedia. (Surat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan)

a. Sumber Data

Data bersumber dari Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar, Jumlah Optimalisasi Implementasi Kebijakan pada Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar.

b. Metodologi Perhitungan

Penentuan persentase Jumlah hasil Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti pada Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar yang nantinya akan dibandingkan dengan Target Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun.

Dalam pencapaian kinerja diperoleh dari Identifikasi Jumlah kebijakan yang diimplementasikan per jumlah kebijakan yang dirumuskan dalam periode tertentu kali 100% dengan catatan jumlah kebijakan yang benar-benar diimplementasikan atau dijalankan oleh instansi pelaksana.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Pada tahun 2024 Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan dengan target 6 kebijakan dan realisasi 6 kebijakan dan capaian 100% sama dengan tahun 2025 Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan dengan target 6 kebijakan dan realisasi 6 kebijakan dan capaian 100%.

b. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan pada tahun 2025 di dalam dokumen Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2021 – 2026 adalah 6 Kebijakan, terealisasi dengan nilai yang sama yaitu 6

Kebijakan. Maka target tahun kedua pada Renstra 2021 – 2026 untuk indikator terpenuhi atau tercapai target. Sedangkan untuk masa periode Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu untuk periode lima tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target yaitu 6 Kebijakan .

c. Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Adanya dukungan penuh dari seluruh ASN Biro Kesejahteraan Rakyat untuk menyelesaikan Kegiatan.
2. Adanya kerjasama Biro Kesra dengan Stakeholder terkait yang menyebabkan berjalan lancarnya kegiatan.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya terjalin Komunikasi dengan Bagian Kesra Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Kesejahteraan Rakyat, dua kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar serta dengan enam sub kegiatan yang mendukung yaitu Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan. Keenam Sub kegiatan tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

✚ **Sasaran 4** : Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Indikator 4 : Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti

Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti (Target Kinerja:6) (Realisasi Kinerja: 6) dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

a. Program Kesejahteraan Rakyat dengan outcome: Jumlah lembaga bina spiritual yang di fasilitasi, Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar dengan target 100%, realisasi 100% dan capaian 100%. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, dengan output terlaksananya fasilitasi pembinaan mental spiritual. Dengan target 1 unit sarana dan prasarana yang dikelola, output 1 unit Sarana prasarana spiritual yang dikelola dan 1 unit Sarana prasarana spiritual yang dikelola
- Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual, dengan output jumlah fasilitasi yang diberikan kepada kelembagaan bina spiritual.

Target 100 Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi, Output 100 Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi, dengan capaian 100%.

2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dengan sub kegiatan:

- Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang pendidikan, dengan Target 1 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, output 1. Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dan capaian sebesar 100%.
- Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, dengan target 1 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, output 1 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kesehatan. Dan capaian sebesar 100%.
- Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, target 1 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dengan output 1 Dokumen dan Capaian sebesar 100 %.

3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dengan sub kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata, dengan target 1 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, output 1 kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang disusun dan capaian 100%.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dengan target 1 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerjadengan output target 1 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang disusun dan capaian 100%
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan, dengan target 1 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan, output 1 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan

Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan, dan capaian 100 %.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
I	Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	6	6	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik berdasarkan tabel 3.1. Pencapaian Indeks Meningkatnya Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yaitu dari target 6 Meningkatnya Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi 6 Meningkatnya Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di tahun 2025.

Penetapan target kinerja dengan indikator kinerja Persentase Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti sebanyak 100% berdasarkan jumlah kebijakan kesra pelayanan dasar yang diimplementasikan.

1.Realisasi

Evaluasi Kebijakan Kesra Pelayanan Dasar dilaksanakan sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan : Melaksanakan Penilaian Stratifikasi UKS/M Paripurna Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2. Bidang Kesehatan : Melaksanakan Rapat Evaluasi dengan Stakeholder Terkait
3. Bidang Sosial : Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait guna optimalisasi implementasi policy brief yang telah dibuat.
Dengan dilaksanakannya 3 kegiatan tersebut di atas, maka capaian target kinerja dengan indikator kinerja Persentase Hasil Evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : $3/3 \times 100\% = 100\%$.

Evaluasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena pada tahun berjalan, telah dilakukan sejumlah evaluasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, khususnya terkait dengan hasil rumusan kebijakan yang sudah dibuat. Dari total rekomendasi yang dihasilkan, sebagian besar telah ditindaklanjuti melalui rapat evaluasi dengan melibatkan stakeholder terkait. Namun, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum sepenuhnya diimplementasikan karena keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan. Ke depan, diperlukan mekanisme monitoring yang lebih ketat agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara konsisten.

f. a. Sumber Data

Data bersumber dari Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar, Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti pada Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar.

g. b. Metodologi Perhitungan

Penentuan persentase Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti pada Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Kesra Non Pelayanan Dasar yang nantinya akan dibandingkan dengan Target Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Pada tahun 2024 Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti dengan target 6 evaluasi kebijakan dan realisasi 6 evaluasi kebijakan dan capaian 100% sama dengan tahun 2025 Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti dengan target 6 evaluasi kebijakan dan realisasi 6 evaluasi kebijakan dan capaian 100%.

b. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan pada tahun 2025 (tahun kedua) di dalam dokumen Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2021 – 2026 adalah 6 Kebijakan, terealisasi dengan nilai yang sama yaitu 6 Kebijakan. Maka target tahun kedua pada Renstra 2021 – 2026 untuk indikator terpenuhi atau tercapai target. Sedangkan untuk masa periode Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu untuk periode lima tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target yaitu 6 Kebijakan .

c. Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Adanya dukungan penuh dari seluruh ASN Biro Kesejahteraan Rakyat untuk menyelesaikan Kegiatan.
2. Adanya kerjasama Biro Kesra dengan Stakeholder terkait yang menyebabkan berjalan lancarnya kegiatan.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.

4. Adanya terjalin Komunikasi dengan Bagian Kesra Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Kesejahteraan Rakyat, dua kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar serta dengan enam sub kegiatan yang mendukung yaitu Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan. Keenam Sub kegiatan tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

 **Sasaran 5** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Indikator 5 : Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja: BB (71)) (Realisasi Kinerja : 71.44) dan capaian 100,61%.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
I	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	BB (71,44)	100,61%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 100,61% dengan kategori Sangat Baik, nilai tersebut didapat dari penilaian yang dilakukan oleh inspektorat terhadap SAKIP dan LKJIP setiap tahunnya.

berdasarkan tabel 3.1. Pencapaian Indeks Nilai Akuntabilitas Kinerja, yaitu dari target 71 Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan realisasi 71,44 Nilai Akuntabilitas Kinerja di tahun 2025.

1.Realisasi

a. Sumber Data

Data bersumber dari Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 yang sudah dilakukan evaluasi oleh Instansi terkait yang berwenang dalam pemberian nilai tersebut.

b. Metodologi Perhitungan

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan Reviu dan Wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Sumatera Barat yang dievaluasi, melalui penerapan

dokumen-dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Matrik 5 (lima) Tahunan, Laporan Kinerja (LKJ) dan dokumen lainnya sebagai bukti fisik.

Dengan Rumus sebagai berikut :

Realisasi/Target x 100%

= BB (71,44) / BB (71) x 100% = 100,61%

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Analisa capaian kinerja tahun 2025

Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 di targetkan sebesar 71, terealisasi 71,44 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,61% (Sangat Baik).

Nilai hasil evaluasi SAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar 71,44 merupakan hasil dari evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 dengan hasil komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	SKOR MAX	NILAI EVALUASI 2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,23
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,59
4	Evaluasi Internal	25,00	15,92
NILAI HASIL EVALUASI		100	71,44

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

c. Pada bagian ini dapat dijelaskan perbandingan realisasi kinerja dan capaian tahun 2024 dengan tahun 2025, pada tahun 2024 biro Kesejahteraan Rakyat mendapatkan nilai akuntabilitas sebesar 69,64

sedangkan pada tahun 2025 Biro Kesejahteraan Rakyat mendapatkan nilai akuntabilitas sebesar 71,44 terjadi kenaikan yang signifikan terhadap capaian kinerja pada tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2025 (tahun kedua) di dalam dokumen Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2021 – 2026 adalah 71, terealisasi dengan nilai 71,44 atau 100,61%. Maka target tahun kedua pada Renstra 2021 – 2026 untuk indikator sudah terpenuhi. Sedangkan untuk masa periode Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu untuk periode lima tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target yaitu 71 .

e. Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

f. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja OPD yaitu :

A. Perencanaan Kinerja

- Perjanjian kinerja dan rencana kerja tahunan sudah selaras dengan Renstra
- Target kinerja yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sudah sesuai dengan basis data yang memadai dan argument yang logis untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan
- Rencana aksi sudah dijadikan pedoman untuk arah capaian kinerja, minotoring rencana aksi akan kami lakukan secara periodik setiap ada deviasi akan dilakukan analisis dan akan dicarikan solusinya, pada akhirnya akan dibuat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target kinerja

B. Pengukuran Kinerja

- Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi sudah dijadikan dasar pembuat indikator kinerja individu
- SOP tentang pengumpulan data kinerja sudah dibuat supaya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, pengumpulan data kinerja sudah dilakukan setiap tahunnya dengan menggunakan teknologi informasi

C. Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja telah membandingkan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya dan data tahun lain yang diperlukan
- Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja output penting lainnya yang terkait pencapaian sasaran kinerja instansi, berikut kendala dan hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditetapkan
- Informasi kinerja sudah dimanfaatkan dalam penilaian dan perbaikan pelaksanaan program, kegiatan untuk peningkatan capaian kinerja ditahun selanjutnya

D. Evaluasi Internal

- Evaluasi akuntabilitas sudah ditetapkan secara lengkap dan memuat penilaian rencana aksi yang telah ditetapkan
- Capaian kinerja sudah dievaluasi secara berkala
- Indikator kinerja, program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan program sudah dilakukan evaluasi secara berkala

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

- Biro Kesejahteraan Rakyat sudah merealisasikan dan meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan
- Informasi kinerja sudah berdasarkan sumber data yang jelas dari sumber-sumber yang kompeten
- Telah dilakukan evaluasi IKU dan IKI secara berkala

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, enam kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta dengan dua belas sub kegiatan yang mendukung yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, penyediaan Jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, serta pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya. Dua belas Sub kegiatan tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

 **Sasaran 6** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Indikator 6 : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi

Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi {Target Kinerja: B(87)} {Realisasi Kinerja : B(83)} dan capaian 95,40%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan outcome persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target 100%, realisasi 100% dan capaian 100%, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output jumlah ASN yang mendapatkan honor.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan output jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran yang disiapkan.

(3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output jumlah bimtek yang dilaksanakan.

(4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output jumlah alat tulis kantor yang disediakan dan jumlah makan minum rapat yang disediakan.
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, dengan output jumlah cetak amplop sekda, jumlah cetak blanko SPPD, jumlah cetak map biro, jumlah fotocopy penggandaan berkas.

- Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah.
- (5) Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya, dengan output jumlah komputer baru yang tersedia, jumlah laptop baru yang tersedia, jumlah printer baru yang tersedia, jumlah TV baru yang tersedia.
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun.
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
I	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Baik (87)	83	95,40%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 95,40% dengan kategori Sangat Baik, nilai tersebut didapatkan dari aplikasi sepakat yang disebar terhadap masyarakat yang dilayani oleh biro kesra.

Tidak tercapainya target Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi tersebut kemungkinan terjadi dikarenakan :

1. kurangnya sumber daya (personil, fasilitas, anggaran)
2. Komunikasi yang tidak efektif antara petugas dan penerima layanan
3. Proses birokrasi yang rumit atau lambat
4. Faktor Eksternal seperti lokasi atau aksesibilitas

1.Realisasi

a. Sumber Data

Data bersumber dari data primer yaitu penyebaran kuisioner dimana terdapat pada sub bagian yaitu fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dan kuisioner disebar kepada masyarakat yang mengurus pencairan hibah mesjid dan lembaga-lembaga yang mendapatkan hibah. Banyaknya kuisioner yang

disebar dari Sub Bagian fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual yaitu sebanyak 679 kuisioner, 5 pertanyaan.

b. Metodologi Perhitungan

Penentuan Indeks Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi ditentukan dengan menyebarkan kuisioner kepada tamu-tamu yang melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengurus pencairan hibah masjid dan lembaga, kemudian dilakukan penghitungan sesuai dengan Permenpan nomor 14 Tahun 2017 sehingga nantinya didapatkan hasil dari penilaian kuisioner tersebut.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Pada tahun 2024 indikator kinerja *Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi* mempunyai target 83 dan realisasi sebesar 87. Pada tahun 2025 indikator kinerja *Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi* mempunyai target 87 dan realisasi sebesar 83.

b. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan pada tahun 2025 (tahun kedua) di dalam dokumen Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2021 – 2026 adalah B(87), terealisasi dengan nilai turun yaitu B(83). Maka target tahun kedua pada Renstra 2021 – 2026 untuk indikator terpenuhi atau tercapai target. Sedangkan untuk masa periode Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu untuk periode lima tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target yaitu B .

c. Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Adanya dukungan penuh dari seluruh ASN Biro Kesejahteraan Rakyat untuk menyelesaikan Kegiatan.
2. Adanya kerjasama Biro Kesra dengan Stakeholder terkait yang menyebabkan berjalan lancarnya kegiatan
3. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya terjalin Komunikasi dengan Bagian Kesra Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, sehingga kegiatann berjalan dengan lancar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Kesejahteraan Rakyat, satu kegiatan yaitu Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, serta satu sub kegiatan Fasilitasi kelembagaan Bina Spiritual. Satu Sub kegiatan tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

4.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2025 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp.28.935.589.000,- Hingga 31 Desember 2025, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 95.36% atau sebesar Rp. 27.592.167.649,- dimana dilihat dari persentase pencapaiannya sudah tergolong pada tingkat sangat baik (>85%). Hal ini tidak terlepas dari

perencanaan serta konsistensi aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan.

**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025**

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan/Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
			Nilai (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,509,326,232	2,332,553,578	92.96	176,772,654
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,843,000	42,216,000	69.39	18,627,000
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,792,000	4,776,000	99.67	16
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,450,000	0	0	18,450,000
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,601,000	37,440,000	99.57	161
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,785,000	10,688,125	99.1	96,875

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025

4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,185,000	1,096,125	92.5	88,875
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9,600,000	9,592,000	99.92	8
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	8,000,000	7,944,600	99.31	55,4
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8,000,000	7,944,600	99.31	55,4
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	1,500,000	30	3,500,000
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,000,000	1,500,000	30	3,500,000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025

4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,333,802,232	2,179,693,853	93.4	154,108,379
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242,204,218	175,829,283	72.6	66,374,935
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,975,000	2,844,375	95.61	130,625
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,088,623,014	2,001,020,195	95.81	87,602,819
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,450,000	9,425,000	99.74	25
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,450,000	9,425,000	99.74	25
4.01.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,446,000	81,086,000	99.56	360
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,316,000	79,291,000	99.97	25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025

4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,130,000	1,795,000	84.27	335
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	26,426,262,768	25,259,614,071	95.59	1,166,648,697
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	25,400,938,618	24,502,796,721	96.46	898,141,897
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	2,174,555,214	2,103,854,112	96.75	70,701,102
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	23,226,383,404	22,398,942,609	96.44	827,440,795
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	862,345,750	648,717,000	75.23	213,628,750
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	770,055,000	636,759,000	82.69	133,296,000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025

4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	23,180,750	11,958,000	51.59	11,222,750
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	69,110,000	0	0	69,110,000
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	162,978,400	108,100,350	66.33	54,878,050
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	84,577,500	47,057,500	55.64	37,520,000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025

4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	52,225,900	36,579,250	70.04	15,646,650
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	26,175,000	24,463,600	93.46	1,711,400
Total		Rp 28.935.589.000	Rp 27.592.167.649	1522,12	Rp 1.343.421.351
Pencapaian			95,36		

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah menyajikan sejumlah keberhasilan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun anggaran 2025 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Dengan demikian LAKIP Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Biro Kesra secara keseluruhan.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2025, secara keseluruhan pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2025 berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 95,36% yang dapat dikategorikan dengan sangat baik dan juga didukung dengan realisasi anggaran sebesar 95,36% dari total anggaran yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat sebanyak Rp. 28.935.589.000,-.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pihak terkait dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan pengelolaan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat yang pada akhirnya dapat mewujudkan Visi dan Misi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Disadari bahwa laporan ini belum sempurna sebagaimana diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sudah mendapatkan sedikit gambaran kinerja yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025.

Dengan berbagai permasalahan yang masih ada, Biro Kesejahteraan Rakyat akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan di setiap level dan bagian organisasi untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di depan.

Lampiran

Perjanjian Kinerja 2025

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401-31402-34425 Fax (0751) 34671, www.sumbarprov.go.id, e-mail : biro_umum@sumbar.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
Nama	: AL AMIN, S.Sos, MM
Jabatan	: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: YOZARWARDI USAMA PUTRA, S.Hut, M.Si
Jabatan	: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
PIHAK KEDUA,	Padang, Januari 2025 PIHAK PERTAMA,
	
YOZARWARDI USAMA PUTRA, S.Hut, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19690406 199701 1 002	AL AMIN, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 19690629 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
TAHUN : 2025

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	8 Lembaga
		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	A (90)
		Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	Peringkat 10 Nasional
2	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	6
3	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	6
4	Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	6
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (71)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	B (87)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 4.980.467.372,-	APBD
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 16.562.003.628,-	APBD
	Jumlah	Rp21.542.471.000,-	

Pj. SEKRETARIS DAERAH



YOZARWARDI USAMA PUTRA, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Padang, Januari 2025

**KEPALA BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT**



AL AMIN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690629 199703 1 004